

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara yang demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana semua masyarakat yang ada di Negara ini memiliki kebebasan yang sama untuk membuat keputusan yang dapat mengubah standar hidup mereka menjadi lebih baik. Indonesia juga menganut sistem demokrasi dimana sistem demokrasi dapat berupa sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diberikan atau diurus oleh pemerintah Indonesia harus mempunyai dampak yang signifikan, agar siap memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia (DHARU, 2021).

Indonesia juga merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan desentralisasi. Sistem desentralisasi juga merupakan sistem yang pemerintahannya dijalankan oleh masing-masing daerah. Kebijakan desentralisasi menekankan bahwa setiap pemerintah daerah di Indonesia mengelola pemerintahan dan mengelola keuangan daerahnya sendiri, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat (Astriandy, 2018).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perekonomian di Indonesia, kebijakan yaitu good government governance atau disebut dengan pemerintahan

yang baik. Good governance adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam mengelola pembangunan selama pemerintahan yang baik.

*Good governance* ialah prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bertanggung jawab serta bebas KKN (Yuliafitri & Rivaldi, 2017). Konsep *good governance* untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilatar belakangi oleh banyak faktor. Namun demikian salah satu faktor yang terbesar adalah ketidakberdayaan pemerintah negara-negara berkembang dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan kompetensi standar tinggi. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain tetapi mengharapkan peran lebih besar dari sektor swasta dan masyarakat sipil.

Perananan pemerintah desa dalam melaksanakan Good Governance adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Menurut Setyowati (2019) dalam rangka membangun *good governance*, dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak

terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain: (1) akuntabilitas (*accountability*) yang di artikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (3) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Suatu organisasi seperti pemerintah desa didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Organisasi tersebut harus mengelola berbagai dan rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam organisasi dilakukan oleh manusia (*humanbeing*) yang bertindak sebagai aktor atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan, maka dengan sendirinya kinerja (*performance*) organisasi yang bersangkutan banyak tergantung pada perilaku manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut.

Analisis terhadap kinerja organisasi publik menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis. Informasi mengenai kinerja organisasi publik dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja organisasi sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukurannya hendaknya dapat dimaksudkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.

Oleh karena itu evaluasi kinerja organisasi merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, terdapat banyak faktor yang turut mempengaruhi kinerja organisasi, diantaranya adalah sejauh mana organisasi tersebut menjalankan fungsi pelayanan kepada publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik dapat dipastikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya organisasi pemerintahan desa (Ramadhani, 2022).

Besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa, memperlihatkan bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ironinya, pemberian tanggung jawab yang besar tersebut tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik. Alhasil, lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan desa masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari kurang disiplinnya aparat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, di sisi lain pemberian otonomi desa melahirkan kantong korupsi baru di negara.

Kabupaten Banjarnegara saat ini sedang gencar-gencarnya menggalakkan gerakan anti korupsi, banyak pejabat pemerintahan yang tersandung masalah korupsi dan bahkan bupati kabupaten Banjarnegara telah menjadi tersangka kasus

korupsi. Dengan maraknya kasus korupsi di Jawa Tengah, gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat gerakan desa-desa anti korupsi sebagai pencegahan korupsi dari bawah. Saat ini sudah ada 29 Desa Antikorupsi di Jawa Tengah khususnya Banjarnegara. Desa-desa tersebut adalah, Sijunggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani. Kemudian Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru dan Tanurejo.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudhasena & Putri (2019) menyatakan bahwa *good governace* dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa, pada penelitian yang dilakukan oleh Haura et al., (2019) menyatakan bahwa *good governance* dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pada penelitian Mailoor et al., (2017) kualitas pelayanan dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu pada penelitian ini menggunakan variabel kualitas pelayanan publik sebagai variabel intervening guna menganalisis pengaruh *good governace* terhadap kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Kualitas Pelayanan Publik Sebagai Variabel (Studi Empiris Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjarnegara)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
2. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik?
3. Apakah kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
4. Apakah terdapat pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah desa dengan kualitas pelayanan publik sebagai variabel intervening?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kualitas pelayanan publik.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah desa dengan kualitas pelayanan publik sebagai variabel intervening.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Praktis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah desa dengan kualitas pelayanan publik sebagai variabel intervening. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian yang akan datang dengan menggunakan topik yang sama.

##### 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan meningkatkan kinerja pemerintah desa sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi tambahan literatur dalam bidang sektor publik khususnya tentang *good governance*, dan kinerja pemerintah desa sehingga mampu menjadi sarana informasi bagi masyarakat desa terkait kepercayaan terhadap kinerja pemerintah desa dengan bagusnya penerapan *good governance* sehingga meningkatkan kualitas pelayanan. Dan bagi peneliti dapat memberikan pengetahuan tambahan

mengenai Pengaruh Prinsip good governance Terhadap Kinerja Pemerintah  
Desa Dengan Kualitas Pelayanan Publik sebagai Variabel Intervening.